

**PENGEMBANGAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) KELEMBAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN JEPARA**

Oleh:

Adhela Mahda Hapsari, Titik Djumiarti

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

**DEVELOPING INSTITUTIONAL CAPACITY IN MUNICIPAL OFFICE FOR
DISASTER PREVENTION OF JEPARA REGENCY**

In performing their duties and responsibilities, organizations are often faced with problems related to institutional capacity development. The Municipal Office for Disaster Prevention of Jepara Regency is necessary to make efforts in evaluating disasters. The office, including the providing facilities and infrastructure pursuant to the standards required by the National Office for Disaster Prevention (BNPB), such as adequate budgets and capable human resources. This descriptive-qualitative study aimed to find out the institutional capacity development of the municipal office for disaster prevention (BPBD) of Jepara Regency in preventing. The study found that the institutional capacity at BPBD of Jepara Regency had not been optimally developed due to lacking budgets, poor quality and limited human resources, and infrastructures as well as facilities. The study also found lacking participation of all staff in the decision-making process. The supporting factors of the institutional capacity development at the municipal office for disaster prevention of Jepara Regency included mutual commitment between stakeholders to preventing disasters and environmental conservation. Whereas, the impending factors were staff resistance and legal procedures dealing with the disaster prevention efforts. The study recommended public-private collaboration through corporate social responsibility programs as well as good cooperation and periodical coordination with concerned municipal working units

Keywords: Organizational, institutional capacity building, resource

ABSTRAKSI

Penelitian ini, berbagai masalah yang sering dijumpai organisasi kurang mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelembagaan organisasi BPBD Kabupaten Jepara dalam penanggulangan bencana melihat perlu adanya peningkatan sumber daya, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, pengumpulan dokumentasi.

Pengembangan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana masih terkendala dari kekurangan sarana dan prasarana transportasi yaitu mobil toilet, mobil pengambil korban bencana dan peralatan-peralatan khusus untuk dalam mendukung selain itu sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat minim kemampuan keahlian dalam penanggulangan bencana dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih terbatas hal ini juga perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi dalam mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan di BPBD Kabupaten Jepara melainkan peraturan yang terkaadang tumpang tindih sehingga menjadi tidak jelas dalam melakukan penanggulangan bencana dan daya dukung dari anggota dalam pengembangan kapasitas kelembagaan masih kurang optimal.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan BPBD Kabupaten Jepara perlu peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana dengan menjalin kepada pihak swasta, membuka kerjasama dalam pelatihan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan secara langsung.

Kata Kunci : Organisasi, Pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana. Adapun jenis ancaman bencana di Kabupaten Jepara adalah : banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, abrasi daerah pantai, kegagalan teknologi dan konflik sosial.

Menurut Undang – Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

menjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pada tahun 2011 bersamaan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Jepara membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang merupakan lembaga/Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara yang bergerak dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat Daerah sebagai implementasi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas adanya hambatan-hambatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya antara lain anggaran. Program-program kegiatan Prabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara membutuhkan anggaran yang cukup besar diantaranya program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam namun anggaran prabencana masih sangat minim. Selanjutnya tidak kalah penting bahwa BPBD Kabupaten Jepara berkoordinasi antara lembaga yang terkait dalam menuntaskan permasalahan bencana namun masih terdapat egos sektoral SKPD terkait dalam penanggulangan bencana. Hambatan dalam penanggulangan bencana juga terdapat pada sumberdaya manusia di dalam organisasi. Apabila tingkat kemampuan sumberdaya manusia baik tentu mempengaruhi dalam melaksanakan tugasnya, sumberdaya manusia yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Jepara yang memiliki keprofesionalan dalam menanggapi bencana. Selain sumber daya manusia organisasi memerlukan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Jepara tergolong organisasi yang masih baru terbentuk yaitu pada tahun 2012 sehingga masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanggulangan

bencana baik peralatan kantor maupun peralatan penanggulangan bencana.

Kualitas pemimpin selaku pengelola dan pelaksana utama dalam proses penanganan bencana sebenarnya juga sangat mempengaruhi pengembangan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Jepara dan daya dukung peraturan BPBD Kabupaten Jepara haruslah memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan ini berkaitan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

Pada prinsipnya, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara harus senantiasa ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dengan tujuan memperbaiki permasalahan yang ada agar lebih maksimal

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengembangan kapasitas pada tingkat kelembagaan di Badan Penanggulangan Bencana Jepara?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan kapasitas pada tingkat kelembagaan di Badan Penanggulangan Bencana Jepara?

C. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pengembangan kapasitas pada tingkat kelembagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan kapasitas pada tingkat kelembagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.

D. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pengembangan kapasitas dalam organisasi publik, institusi Pemerintahan dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan (*level*) dalam mencapai kapasitas yang maksimal dibawah ini dijelaskan tingkatan dalam pengembangan kapasitas menurut Milen sebagai berikut.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*) dalam Milen (2006: 22), menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan (*level*) yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan itu yaitu tingkatan sistem/kebijakan terdiri dari Peraturan per Undangan, Kebijakan, tingkatan organisasi/lembaga terdiri dari Sumber Daya, Ketatalaksanaan, Struktur Organisasi, Sistem Pengendalian Keputusan dan tingkatan individu/sumber daya manusia terdiri dari Pengetahuan, Keterampilan, Kompetensi, Etika.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, Pengembangan kapasitas kelembangaan dapat dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- b. Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- c. Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas
- e. Penerapan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*)
- f. Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;

a. Sumber Daya

Bryson dalam (Tjanja dkk, 2005:48) menjelaskan bahwa, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi publik secara teoritis menyeluruh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja, pertama aspek-aspek input atau sumberdaya-sumberdayanya antara lain : Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan anggaran

b. Budaya Organisasi

Menurut Daniel R. Denison dalam Laksmi Asri (2011: 7), budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi sistem dan praktek-praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut.

Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari organisasi menurut Robbins dalam Laksmi Asri (2011: 21-23), antara lain: Kepemimpinan, Inovasi, Inisiatif Individu, Toleransi terhadap resiko, Pengarahan, Integras, Dukungan manajemen, Pengawasan, Identitas, Sistem penghargaan, Toleransi terhadap konflik dan Pola Komunikasi.

c. Sistem Pengambilan Keputusan

Menurut Prof. Dr.J.Salusu, M.A. dalam buku Pengambilan Keputusan Stratejik (2005:47) Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi.

Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi.

d. Struktur Organisasi

Organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Bahwasebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi(Stephen R, 1995: 6)

e. Tata Laksana

Menurut Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara (Nomer 12 Tahun 2011 : 4) Manajemen Tatalaksana pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi. Penatatan tatalaksana merupakan suatu silus perencanaan, pelaksanaan, pemberlakuan, monitoring dan evaluasi.

f. Standart Operating Production Procedures (SOP)

Berdasarkan Peraturan Nomer 12 Tahun 2011Standart Operating Production Procedures (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin.

E. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Kepala pelaksana BPBD Kab. Peneliti menggunakan indikator panduan pelaksanaan program TTG dari paten Jepara, Sekretaris , Ketua Pelaksana kesiapsiagaan dan pencegahan, Ketua seksi kedaruratan dan Logistik, Ketua rehabilitasi dan rekontruksi.Sumber data yang digunakan sumber data primer

dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data Peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan model analisis interaktif.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan BPBD Kabupaten Jepara

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan sebuah upaya peningkatan kemampuan organisasi dalam mengikuti perubahan dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor yang ada didalam organisasi dengan bertujuan mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemantau secara proposional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas.Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Jepara, ada beberapa dimensi yang diamati dalam penelitian ini, dimensi tersebut yaitu kepemilikan sumber daya, struktur organsasi, ketatalaksanaan, pengambilan keputusan, SOP (Standard Operating Prosedur) dan faktor-faktor pendorong dan penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan

Dimensi pertama kepemilikan organisasi dapat dilihat beberapa aspek yaitu sarana dan prasana, anggaran dan sumber daya manusia. Aspek pertama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tebagi menjadi 3 yaitu alat alat transportasi, alat penanggulangan bencana dan peralatan kantor. Alat transportasi BPBD Kabupaten Jepara memang terbatas, sedangkan melihat kebutuhan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana (pra bencana) dan pada saat terjadi bencana membutuhkan ketersediaan alat transportasi yang memadai

mempercepat proses menuju lokasi kejadian bencana dan evakuasi korban bencana sehingga BPBD Kabupaten Jepara harus mampu mengelola dan menggunakan alat transportasi ini secara efektif untuk mengcover seluruh aktivitas dalam penanggulangan bencana. Alat transportasi BPBD Kabupaten Jepara yaitu mobil rescue tersedia 2 unit, mobil pick up 1 unit, motor trail 4 unit dan motor operasional 4 unit sedangkan kebutuhan mengenai kecukupan sarana dan prasarana dalam prakteknya untuk mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alat transportasi yang harus dimiliki oleh BPBD Kabupaten Jepara yaitu ketersediaan motor trail 10 unit dan ketersediaan mobil rescue 4 unit. Peralatan BPBD Kabupaten Jepara belum sesuai dengan peraturan BNPB serta menyesuaikan ancaman bencana di Kabupaten Jepara baik kendaraan atau alat transportasi dan peralatan penanggulangan bencana berdasarkan denngan jenis bencana. Selain sarana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jepara membutuhkan prasarana yaitu gedung di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan melihat luas bangunan kantor 1336 M2 sangat sempit baik untuk ruang kerja, gedung alat transportasi dan tidak ada ruang tamu perlu adanya peningkatan kapasitas.

Aspek yang kedua yaitu anggaran. BPBD Kabupaten Jepara dalam membiayai kegiatan atau program penanggulangan bencana menggunakan sumber pendapatan APBD. Sumber anggaran APBD membiayai seluruh kegiatan untuk seksi pencegahan dan peringatan dini, seksi kedaruratan dan logistik dan seksi rehabilitasi rekonstruksi dengan jumlah Rp. 1,175,000,000, sumber anggaran APBD tersebut untuk membiayai ke 3 seksi tersebut BPBD

Kabupaten Jepara masih membutuhkan sumber anggaran dukungan untuk mengcover kekurangan pembiayaan kegiatan atau program. BPBD Kabupaten Jepara meminta bantuan ke BNPB atau bantuan dari pusat untuk membiayai program kegiatan dana tersebut yakni melalui DSP (Dana Siap Pakai). Dana siap pakai yang dikucurkan dari (BNPB) berjumlah Rp.463.000.000 juta dialokasikan untuk membiayai program kegiatan

Aspek ketiga dalam sumber daya yaitu sumber daya manusia. BPBD Kabupaten Jepara berasal dari organisasi kemanusiaan dan relawan bencana. Kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas penanggulangan membutuhkan tenaga teknis lapangan yang memiliki keahlian khusus dalam penanggulangan bencana.

Dimensi kedua dalam melihat kapasitas kelembagaan yaitu Budaya Organisasi. BPBD Kabupaten Jepara pada prakteknya belum menerapkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi dalam bekerja. Prestasi yang dimiliki pegawai dalam bekerja tidak ada dedikasi yang diberikan, sebagian besar pegawai mengeluhkan tidak ada balas jasa yang diberikan saat melampaui kinerja yang dilakukan berupa pengikutsertakan dalam latihan-latihan pengembangan kemampuan selain permasalahan penghargaan adanya pelanggaran atas perilaku pegawai dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Jepara yaitu keterlambatan pegawai pada jam kerja yang melebihi waktu kerja yang sudah ditetapkan dan adanya beberapa pegawai terkadang pulang jam kerja sebelum waktu ideal waktu kerja selesai .

Dimensi ketiga dalam melihat pengembangan kapasitas adalah

struktur organisasi. BPBD Kabupaten Jepara dalam menyelesaikan tugas selain koordinasi diantara setiap seksi dalam menanggulangi bencana berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana namun dalam pelaksanaan masih terhalang dalam persamaan persepsi dalam penanggulangan

Dimensi keempat dalam melihat pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu ketatalaksanaan. Keterlibatan anggota atau pegawai dalam rangka perumusan perencanaan penanggulangan bencana sering kali ditemui susah untuk diajak berdiskusi dalam sebuah rapat dalam merumuskan kegiatan program hal ini menyebabkan program atau kegiatan yang disusun sama dengan tahun-tahun (copy paste) sebelumnya serta dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Dimensi kelima dalam menilai pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu SOP (*Standard Operating Procedure*). Pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Jepara berdasarkan dengan SOP (Standartd Operasi Prosedur) yaitu mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan pertama-tama melihat hasil informasi kejadian bencana setelah itu koordinasi dengan instansi terkait kemudian BPBD Kabupaten Jepara menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana menuju lokasi untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana/musibah. BPBD Kabupaten Jepara menyiapkan peralatan-peralatan memfasilitasi pencarian dan pertolongan (SAR) dan evakuasi /Penanggulangan Bencana bergerak kelokasi kejadian kemudian TRC (Tim Reaksi Cepat) melakukan koordinasi dengan Intansi terkait dan mengadakan briefing kepada personil Satgas SAR dan Relawan serta Dinas

yang terkait dan membagi tugas dan terakhir melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Evakuasi di lokasi kejadian.

Dimensi keenam dalam mengukur pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu sistem pengambilan keputusan. Anggota dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan anggota tidak memiliki andil secara langsung dalam menuntaskan sebuah permasalahan seluruh keputusan berada ditangan pimpinan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPBD Kabupaten Jepara

Pembangunan kapasitas lembaga di Indonesia paling tidak terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan terdapat pula faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pengembangan kapasitas lembaga

A. Komitmen bersama

- Anggota BPBD Kabupaten Jepara perlu adanya peningkatan semangat dan komitmen dalam bekerja
- Pemerintah Daerah dalam memberikan anggaran kepada BPBD Kabupaten Jepara perlu adanya penambahan
- Tidak ada jalinan kerjasama anggaran dan peran serta dalam penanggulangan bencana dengan pihak swasta
- Kepedulian dan nilai-nilai masyarakat yang mulai luntur dalam menjaga kelestarian alam sekitar

B. Kepemimpinan yang kondusif

- Sebagai pemimpin peduli terhadap kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Jepara
- Sebagai pemimpin selalu terbuka dengan seluruh anggota baik permasalahan maupun informasi.

- Sebagai pemimpin totalitas dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana dan ikut terjun langsung dalam proses evakuasi kejadian bencana. Sikap pemimpin dalam mengarahkan anggota tegas. dan dalam memutuskan sebuah masalah mempertimbangkan anggota.
 - Komunikasi yang terjalin baik internal organisasi BPBD Kabupaten Jepara dan komunikasi dengan pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat bagus .
 - Sebagai pemimpin selalu antusias dalam mencari kebutuhan sumber-sumber daya dan tugas yang diemban yang dijalankan
- C. Resistensi Legal Prosedural
- Pemahaman yang berbeda dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan peraturan penanggulangan bencana yang mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Jepara.
 - Pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Jepara dalam proses evakuasi bencana terkadang bukan menjadi tugas pokok fungsi dalam memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan kurang adanya kejelasan tugas dengan SKPD terkait.
- D. Resistensi dari Staff
- Anggota di BPBD Kabupaten Jepara sulit diajak berkembang ke arah lebih maju hal ini dikarenakan faktor tingkat pendidikan.
 - BPBD Kabupaten Jepara prasarana gedung terbatas ruang kerja sehingga tidak merasa nyaman dalam melakukan aktivitas
 - Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Jepara tidak ada kemauan meningkatkan kemampuan diri dalam penanggulangan bencana
 - Perlu adanya peningkatan motivasi dan inovasi anggota dalam menjalankan tugas
 - Anggota di BPBD Kabupaten Jepara tidak ada kompetisi dalam bekerja untuk menjadi yang terbaik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan adalah sebuah jawaban atas tuntutan pelayanan publik dan permasalahan untuk melakukan perubahan organisasi menjadi lebih baik menghadapi tantangan baik faktor lingkungan internal dan faktor eksternal organisasi. BPBD Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kemampuan dan eksistensi melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*) yang dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No. 59 2012 dan teori Anneli Millen.

5. 1. 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan di BPBD Kabupaten Jepara

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*) yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jepara melalui beberapa indikator sebagai berikut :

a. Kepemilikan Sumberdaya

Kepemilikan sumberdaya di dalam organisasi terbagi menjadi beberapa aspek yaitu sarana dan prasarana, anggaran, budaya organisasi dan sumber daya manusia.

- Sarana prasarana BPBD Kabupaten Jepara yaitu alat transportasi mobil rescue tersedia 2 unit, mobil pick up 1 unit, motor trail 4 unit dan motor operasional 4 unit sedangkan peralatan kantor yaitu komputer tidak semua pegawai memiliki dalam mempermudah dalam menjalankan tugas. Sarana dan prasarana seharusnya dapat mempermudah menjalankan tugas namun di BPBD Kabupaten Jepara baik alat transportasi dan peralatan kantor sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Melihat sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Jepara juga belum semua terstandarisasi berdasarkan

undang-undang yang telah ditetapkan alat-alat penanggulangan bencana hanya bersifat sederhana dan kondisi penataan ruang yaitu ruang bekerja, ruang tamu, ruang gudang, ruang fasilitas umum di BPBD Kabupaten Jepara sangat minim jarak antar ruang saling berhimpitan satu sama lainnya.

- Sumber anggaran BPBD Kabupaten Jepara selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yaitu berjumlah Rp, 1,175,000,000 untuk membiayai seluruh kegiatan seksi-seksi penanggulangan bencana namun dalam perencanaannya alokasi anggaran yang ada tidak dapat merata yaitu jumlah alokasi anggaran terbesar pada seksi kesiapsiagaan dan pencegahan, anggaran juga berasal dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang berjumlah Rp.463.000.000 untuk menutup kekurangan pembiayaan kegiatan seksi-seksi di BPBD Kabupaten Jepara dan jumlah anggaran BPBD Kabupaten Jepara berdasarkan dengan kemampuan Pemerintah daerah.
- Sumber daya manusia BPBD Kabupaten Jepara dalam menyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketersediaan untuk mengerjakan kegiatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan teknis sering terjadi rangkap tugas. BPBD Kabupaten Jepara sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana melihat kualitas sumber daya manusia yang masih berdasarkan wawasan pengetahuan belum memiliki keahlian khusus yang tersertifikasi yaitu keahlian menyelam, keahlian rekonstruksi bangunan dan keahlian psikologi.

b. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi BPBD Kabupaten Jepara tergabung dalam setiap seksi dalam menjalankan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu seksi kesiapsiagaan dan pencegahan, seksi kedaruratan dan logistik dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, seharusnya adanya pemisahan dalam setiap seksi untuk mengurangi kewenangan. Pembagian tugas dan koordinasi di BPBD Kabupaten Jepara bersinergi dengan seluruh seksi-seksi dalam menangani bencana namun dalam berkoordinasi dengan SKPD terkait BPBD Kabupaten Jepara jalinan komunikasi terkadang terjadi perbedaan dalam menyamakan persepsi.

c. Ketatalaksanaan

Perencanaan program di BPBD Kabupaten Jepara tidak ada pembahasan yang mendetail dalam merumuskan kegiatan hal ini didasarkan program kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan hanya sebatas kegiatan rutin. Pelaksanaan program kegiatan tidak dapat maksimal disebabkan keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan BPBD Kabupaten Jepara hanya melakukan pengawasan berbentuk laporan kegiatan tidak adanya pengawasan secara langsung untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Evaluasi program kegiatan dalam mengelola *website* untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Jepara tidak berfungsi dengan baik dan optimal informasi yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan kebencanaan di Kabupaten Jepara.

d. Budaya organisasi

BPBD Kabupaten Jepara belum menerapkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi anggota yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya tidak

adanya perbedaan sedangkan seharusnya di pegawai membutuhkan penghargaan dalam mencapai prestasi kerja yang dilakukan dan kesalahan-kesalahan yang dilanggar atau tidak ditaati oleh pegawai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Jepara belum menarapkan sebuah peraturan untuk memberikan hukuman dan mengatur perilaku pegawai dalam bekerja.

e. Sistem Pengambilan Keputusan

Anggota di BPBD Kabupaten Jepara dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tidak memiliki andil secara langsung, tetapi permasalahan atau keputusan yang akan diambil akan diputuskan atau diselesaikan ditangan pemimpin

f. SOP (Sistem Operating Prosedur)

Pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Jepara berdasarkan dengan SOP (Standartd Operasi Prosedur) yaitu mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan di BPBD Kabupaten Jepara

1. Komitemen Bersama

Komitmen dapat dilihat 4 aspek yaitu komitmen organisasi, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Komitmen organisasi dalam penyelenggaraan terutama anggota organisasi dalam penanggulangan bencana masih kurang hal ini disebabkan belum adanya pemberian penghargaan tyerhadap kinerja anggota dalam menjalankan tugas selanjutnya komnitmen pemerintah daerah dalam memberikan anggaran masih rendah dalam menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Jepara. Peran swasta

dalam mendukung penyelenggaraan pengembangan kapasitas dalam memberikan bantuan anggaran ditolak oleh BPBD Kabupaten Jepara karena tidak ada juknis yang jelas dan peran masyarakat dalam hal ini nilai-nilai moral sudah menurun dalam mengaja kelestarian alam untuk mencegah terjadinya bencana.

2. Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan di BPBD Kabupaten Jepara sudah kondusif baik dalam memberi arah dan mengelola sumber daya organisasi yaitu selalu berusaha mencari kebutuhan suber daya yang dibutuhkan, keterbukaan pemimpin dalam setiap maslah yang terjadi kepada setiap anggota, sikap pemimpin yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan memberikan arahan dan mengembangkan inovasi baru dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan.

3. Rsistensi Legal Prosedural

BPBD Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prakteknya masih terjadi tabrakan peraturan dengan Pemerintah Daerah yaitu BPBD Kabupaten Jepara berlandaskan peraturan BNPB sedangkan Pemerintah berdasarkan dengan peraturan Kemendagri maupun peraturan Daerah hal ini berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penanggulangan bencana. Tabrakan peraturan ini juga terjadi dengan SKPD terkait tupoksi yang seharusnya bukan menjadi ranah BPBD Kabupaten Jepara dalam menanggulangi bencana namun menjadi tugas yang dilaksanakan.

4. Resintensi Staff

Daya dukung anggota dalam organisasi sangat penting dalam pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi. Anggota di BPBD

Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana susah diajak maju yang dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai di BPBD Kabupaten Jepara sebagai besar SLTA dan dilihat dari inovasi pegawai rendah tidak adanya kompetisi dan tidak adanya kemauan untuk mengembangkan diri disebabkan tidak adanya penghargaan yang diberikan serta adanya faktor keterbatasan anggaran dalam mendukung mengikutsertakan pelatihan-pelatihan dan keterbatasan kondisi ruangan dalam menyelenggarakan tugas membuat anggota menjadi tidak nyaman dalam melakukan gerak hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas anggaran yang ada

Saran

1. BPBD Kabupaten Jepara melakukan penataan sarana dan prasarana baik peralatan kantor dan alat transportasi sesuai dengan peraturan BNPB yang sudah ditetapkan untuk mempermudah dan menjaga kualitas sarana dan prasarana
2. BPBD Kabupaten Jepara melakukan penataan sarana dan prasarana baik peralatan kantor dan alat transportasi sesuai dengan peraturan BNPB yang sudah ditetapkan untuk mempermudah dan menjaga kualitas sarana dan prasarana
3. BPBD Kabupaten Jepara mengikutsertakan anggota dalam pelatihan-pelatihan dengan melakukan kerjasama dengan AL, BASARNAS dan Lembaga –lembaga yang bergerak dalam kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
4. BPBD Kabupaten Jepara menerapkan pengawasan dengan melakukan monitoring langsung secara berkala pada setiap kegiatan lapangan atau teknis setiap 3 kali dalam satu bulan dalam penanggulangan bencana
5. BPBD Kabupaten Jepara melakukan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan standarisasi minimal peralatan penanggulangan bencana dan standarisasi peralatan kantor dengan melakukan rapat koordinasi antara Pemkab Jepara dan CSR atau Swasta dan membuka peluang kerjasama anggaran untuk pembiayaan kegiatan.
6. BPBD Kabupaten Jepara melibatkan peran masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana dengan melakukan kerjasama antara kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dalam hal pencegahan terjadinya bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana.
7. BPBD Kabupaten Jepara melakukan harmonisasi koordinasi dengan SKPD dengan melakukan forum pengintegrasian pemahaman dan pembahasan pelaksanaan program terkait kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki. 2007. *Pengelolaan KEUANGAN DAERAH*. Kreasi Wacana: Yogyakarta
- Cardoso Gomes, Faustino. 2003. *MANAJEMEN Sumber Daya MANUSIA*. Andi Offset : Yogyakarta
- Laksmi Riani, Asri. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Milen, Anneli. 2006. *CAPACITY BUILDING Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:PEMBARUAN
- Robbins, PS. 1994. *Teori Organisasi*. Jusuf Udayana Hak cipta terjemahan Indonesia : Arcan
- Yuwono, Sony dkk, *Penanggunggaran SEKTOR PUBLIK*. Malang: Bayumedia